

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Somalia terletak di antara teluk Aden disebelah utara lautan India Timur. Berbatasan dengan Negara Ethiopia di barat, Djibouti di barat laut dan Kenya di utara. Pada awalnya Somalia adalah daerah jajahan dua negara yaitu Inggris dan Italia. Dengan nama British Somaliland dan Italian Somaliland. Pada tahun 1960, Inggris dan Italia memberikan kemerdekaan kepada daerah jajahannya. Dan unifikasi dua daerah bekas jajahan ini terjadi ketika Djibouti juga merdeka dari koloni Prancis.

Pemerintahan baru ini menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai elemen penting. Dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai pemegang kendali penuh kekuasaan eksekutif. Diketuai oleh Abdullah Issa, Aden Abdullah Osman Daar ditunjuk sebagai presiden pertama Somalia dan Abdirishid Ali Shermake sebagai Perdana Menteri. Di akhir tahun 1967, Abdi Rashid Ali Shermake berhasil menjadi presiden mengalahkan Aden Abdullah Osman Daar. Dan ia menunjuk Mohammed Ibrahim Egal sebagai perdana menteri.

Diakhir tahun 1969 Siad Biarre, seorang jenderal angkatan bersenjata melakukan kudeta dan merebut kendali pemerintahan dari presiden Abdirishid Ali Shermake yang terbunuh. Dibawah revolusi militer, Siad Biarre yang berasal dari

Di bawah kepemimpinannya, Somalia sukses meningkatkan kemampuan baca tulis di desa-desa dimana dari 5 % naik 55 % pertengahan tahun 1980¹. Pemerintahan sosialis Siad Barre ini juga bertujuan mengubah dan memerangi sistem tradisional. Yang pada prinsipnya mempersempit ruang gerak dan pengaruh suku atau kaum, mendorong peran perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pendidikan serta persamaan hak gender. Ditahun yang sama Siad Barre juga membunuh figure umum di kabinetnya yakni Mayor Jenderal Gabiere beserta dua orang pembantunya.

Pemerintahan Barre juga menyatakan bahwa Sosialisme sesuai dengan Islam, agama yang mayoritas di anut oleh penduduk Somalia. Walaupun muslim Somalia bukanlah penganut ortodoks, namun identitas mereka sebagai muslim tidak akan hilang. Hal ini membantu para pemimpin rezim sosialis yang mayoritas muslim dan dalam bahasa politik ini berarti mereka tidak menyerang agama Islam. Dan implikasinya rezim Siad Barre tidak khawatir terhadap munculnya rasa tidak senang dari para pimpinan konservatif muslim. Ditahun 1974 Somalia bergabung dengan Liga Arab dan pada tahun 1977 Somalia juga menginvasi Ogaden, bagian dari wilayah Ethiopia. Pasukan Somalia akhirnya keluar dari wilayah tersebut akibat tekanan Soviet dan pasukan Kuba. Perang yang berakhir tahun 1998 ini terus berlanjut walau dalam skala yang lebih kecil. Akibatnya situasi ekonomi Somalia terpuruk dan terpaksa meminta bantuan negara-negara penghasil minyak seperti Kuwait, Qatar, Saudi Arabia dan Bank Dunia.

¹ Lewis. I.M. *Pastoral Democracy: A study on Pastoralism and Politics among the Northern Somali clans.* Ohio: Ohio University Press, 1958.

Perang Ogaden juga memicu reaksi dari dalam negeri sendiri. Banyak gerakan menentang yang muncul. Salah satunya Somali Salvation Democratic Front (SSDF) yang didirikan oleh beberapa kolonel klan Majeerteen yang melarikan diri keluar negeri paska kudeta militer 1978 dengan tujuan menggulingkan kekuatan rezim Siad Biarre.

Selain tindakan represif terhadap gerakan-gerakan oposisi, Siad Biarre juga mengkampanyekan penentangan terhadap klan-klan lain. Dengan membentuk Somali Revolutionary Socialist Party (SRSP) sebagai satu-satunya partai besar yang berkuasa yang beranggotakan klan-klan keluarganya yakni Mareehaan, Ogaden, Dulbahante (MOD).

Namun gerakan oposisi yang di bentuk klan Isaaq dengan nama Somali National Movement (SNM) menentang SRSP dan terus melakukan gerilya melawan rezim Siad Biarre. Selain klan Isaaq, Biarre juga menyerang klan Hawiye di pusat kota Mogadishu. Hawiye bereaksi dengan membentuk United Somali Congress (USC) yang didukung penuh SNM.

Situasi ini semakin menyudutkan pemerintahan Siad Biarre, termasuk ketika beberapa klan seperti Ogaden yang sebelumnya mendukung penuh pemerintahan rezim. Klan Ogaden menyalahkan Biarre atas kekalahan perang Ogaden dan menentang perjanjian damai dengan Ethiopia. Akibatnya banyak pejabat pemerintahan Ogaden melarikan diri dari ketentaraan dan bergabung dengan Somali Patriotic Movement (SPM), sebuah gerakan oposisi yang didirikan pada tahun 1985 dan juga mendapat dukungan dari SNM. Berbagai gerakan

oposisi ini secara intensif menyerang rezim Siad Biarre.

pemerintahan Siad Biarre dan memegang kendali wilayah di luar pemerintahan. SNM di barat laut, USC di pusat dan SPM di selatan.

Africa Watch melaporkan kurang lebih 50.000 orang sipil terbunuh selama pemerintahan represif Siad Biarre terhadap Majeerteen, Isaaq dan Hawiye². Dan ribuan lainnya mati kelaparan akibat keracunan air sumur dan penyembelihan lembu. Selain itu ratusan ribu lainnya mencari perlindungan keluar negeri.

Situasi semakin tidak terkendali ketika pihak rezim membunuh 450 orang demonstran di Mogadishu pada juli 1989. Akhirnya para pemimpin dari berbagai lapisan masyarakat yang merupakan representasi semua klan dan keturunan membentuk Council for Reconstruction and Salvation, sebuah dewan yang bertugas merekonstruksi dan membentuk perubahan politik kearah yang lebih baik.

Dibulan Mei 1990, Dewan ini mempublikasikan sebuah manifesto kepada Siad Biarre untuk mundur, pembentukan pemerintahan sementara yang mewakili gerakan oposisi dan pengadaan pemilihan umum yang diikuti multi partai. Siad Biarre merespon manifesto ini lewat penangkapan terhadap para signator yang berjumlah 114 orang, tetapi cuma 45 orang yang berhasil ditangkap. Protes dari berbagai negara juga bermunculan terhadap penangkapan ini. Akhirnya kekuatan oposisi berhasil menjatuhkan rezim Siad Biarre pada tanggal 27 Januari 1991.

Walaupun suku-suku yang bersatu ini berhasil menjatuhkan rezim Siad Biarre namun para kepala suku ini tidak mempunyai visi dan tujuan bersama mengenai masa depan Somalia. Pembentukan Pemerintahan sementara oleh

² http://www.africa.unenn.edu/Country_Specific/Somalia.html diakses 25 September 2006

United Somali Congress (USC) yang menunjuk Ali Mahdi Mahammad dari klan Hawiye sebagai presiden, Umar Arteh Ghalib dari klan Isaaq sebagai perdana menteri mendapat tentangan dari berbagai pihak oposisi lainnya. Jenderal Muhammad Faarah Aidid yang menentang presiden memilih keluar dari keanggotaan USC. Sedangkan SSDF dan SPM bergabung untuk melawan USC. Akibatnya pertempuran kembali berkecamuk dan tak terelakkan. Bahkan kendali beberapa wilayah berulang kali berpindah tangan seperti Chisimayu dan Baidoa.

Sejak itu, Somalia tak pernah aman. Wilayah Utara Somalia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun itu juga dengan nama Somaliland dengan klaim sebagai bagian dari protektorat Inggris. Walaupun wilayah Somaliland secara de facto telah merdeka dan relatif stabil dibanding kawasan selatan tetapi hal ini tidak membuat Somaliland di akui legitimasinya oleh negara-negara lain. Pada tahun 1992 Marinir AS dibawah pimpinan pasukan penjaga perdamaian PBB mencoba memulihkan situasi keamanan di Mogadishu dari kecamuk pertikaian antar suku dan kekerasan yang terus terjadi.

Namun operasi yang dinamakan dengan Operation Restore Hope ini mengalami kegagalan. Pada tanggal 3 Maret 1995 dalam Operation United Shield, PBB kembali gagal memulihkan situasi keamanan bahkan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Pada tahun 1998 di wilayah utara paling timur di deklarasikan kemedekaan sementara Puntland dengan tujuan mengupayakan usaha-usaha rekonsiliasi pembentukan pemerintahan Somalia yang baru. Di tahun ini juga terjadi pemisahan lainnya dengan dideklarasikannya Jubaland oleh kolonel Barre

pimpinan Rahanweyn Resistance Army (RRA) yang di bentuk pada tahun 1999, RRA juga memproklamkan kemerdekaanya dan secara de facto menguasai wilayah barat daya Somalia, termasuk wilayah Bay dan Bakool di selatan dan tengah Somalia.

Situasi ini mendorong negara-negara sekitar di antaranya Ethiopia, Kenya termasuk PBB untuk membantu. Namun kekerasan dan pertikaian terus berlanjut. Usaha-usaha mediasi terus dilakukan oleh berbagai negara untuk menyelesaikan permasalahan Somalia. Diantaranya oleh pemerintahan Mesir, Yaman, Kenya dan Italia. Dan di tahun 1997 OAU (Organization of Africa Unity) dan IGAD (Intergovernmental Authority on Development) memberi mandat Ethiopia untuk usaha-usaha rekonsiliasi. Di tahun 2000 komunitas Internasional mengakui pemerintahan transisi di bawah pimpinan Abdulkassim Salat Hassan sebagai pemerintahan yang sah tetapi pemerintahan ini tidak mampu berjalan dan memulihkan kekacauan yang terjadi di pusat ibukota.

Pada tanggal 14 oktober 2004, anggota-anggota parlemen Somalia memilih Abdullah Yusuf yang berasal dari Puntland sebagai presiden. Dan dikarenakan situasi keamanan di Mogadishu yang belum stabil dan kacau, pelantikan ini di lakukan di pusat olahraga , Kenya³. Abdullah Yusuf meraih 189 suara dari 275 suara. Pemerintahan inilah yang diakui legitimasinya oleh mayoritas negara-negara barat, walaupun otoritasnya di dalam negeri lemah dan masih dipertanyakan.

³Castagno, Alphonso A., Jr. "The Horn of Africa and the Competition for Power." Pages 155-80 in Albin J. Cottrell and R.M. Burrell

Didalam negeri sendiri, di bulan Juni 2006 muncul kelompok agama yang berperan sebagai kekuatan politik dan militer yang baru. Kelompok ICU (Islamic Court Union) di pimpin oleh Syeikh Hassan Dahir Aweys berhasil mengambil alih Mogadishu dan daerah strategis di sekitarnya setelah mengalahkan Alliance for Restoration of Peace and counter – Terrorism dukungan Amerika Serikat dan Panglima-panglima perang Somalia.

Kondisi ini semakin kacau ketika Perdana Menteri Mohammed Ali Gedi menolak bernegosiasi dengan ICU yang diikuti dengan pengunduran hampir separoh anggota kabinetnya. Saat ini pemerintahan Somalia dipusatkan di Baidoa, sekitar 250 kilometer dai Mogadishu.

B. Pokok Permasalahan

Mengapa transisi demokrasi paska kejatuhan rezim otoriter Siad Biarre banyak mengalami hambatan ?

C. Kerangka Pemikiran / Teori yang digunakan :

Untuk menggambarkan fenomena demokrasi di Somalia maka penulis menggunakan beberapa kerangka dasar pemikiran

1. Teori Demokrasi

Samuel Huntington mendeskripsikan beberapa faktor penghambat demokrasi terwujud di beberapa negara. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori besar. Yang pertama, adalah politik yakni tidak adanya pengalaman demokrasi pada pemerintahan

8,591,000. yang 60 % merupakan semi-nomadik atau pengembara semakin meyulitkan mekanisme partisipasi demokrasi rakyat Somalia.

Untuk mengukur perekonomian suatu negara digunakan beberapa indikator. Diantaranya adalah *Gross domestic product* (GDP). Di Somalia, perternakan mempunyai kontribusi sekitar 40 % dari GDP. Setelah jatuhnya rezim Siad Biarre yang menganut sistem sosialisme ilmiah maka Somalia mengalami keterpurukan ekonomi dan menjadi salah satu negara miskin dan paling sedikit mempunyai sumber-sumber daya alam. Disamping itu tingkat kematian anak paling tinggi juga terjadi di Somalia.

Robert A. Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik⁵. Yakni sistem politik yang sepenuhnya responsif terhadap semua warga negara. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Jika sarana tindakan pemaksaan dengan kekerasan di netralkan
2. Jika negara itu memiliki suatu masyarakat majemuk yang dinamis dan modern
3. Jika kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat kepada kepala negara saja, tetapi wakil presiden atau perdana menteri tetap memiliki kekuasaan
4. Adanya pemilu yang jujur dan adil
5. Jika negara itu secara budaya homogen atau heterogen, tidak terbagi-bagi dalam beberapa sub kultur yang kuat dan berbeda atau jika

⁵ Robert A. Dahl, *Democracy: Participation and Opposition*, New York, W. W. Norton, 1956, hal. 5.

terbagi-bagi seperti itu, para pemimpin harus berhasil dalam menciptakan suatu tatanan.

6. Konsosiasional untuk mengatur konflik-konflik sub kultur
7. Jika negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak negara luar yang anti demokrasi

Bila dilihat dari beberapa faktor diatas maka Somalia belum bisa dikategorikan ke dalam bentuk negara demokrasi karena belum memenuhi persyaratan yang diajukan Dahl tersebut. Ini bisa dilihat dimana tidak adanya pemilu yang adil dan demokratis, masih kuatnya konflik sub kultur, kendali pemerintahan yang lemah berakibat tidak adanya tatanan pemerintahan yang solid dan kuat. Serta tidak tercapainya kesepakatan konstitusional di antara pihak-pihak yang bertikai.

2. Teori Transisi

Di dalam teori transisi, Huntington menyebutkan bahwa terjadinya demokrasi dari rezim non demokratis dapat melalui 4 proses “

- a. Transformasi atau reforma, dimana elit penguasa mengambil upaya memimpin demokrasi
- b. Replacement atau Ruptura, dimana kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi
- c. Transplacement atau Ruptforma, dimana demokrasi terjadi akibat

negosiasi antara pemerintah dengan kelompok oposisi

- d. Intervensi, hal ini jarang terjadi dimana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakannya dari luar.⁶

Dari empat proses tersebut diatas, transisi demokrasi di Somalia termasuk dalam mode Replacement atau Ruptfora dimana kelompok-kelompok oposisi diantaranya USC, SNM, SPM dan SSDF memberontak terhadap rezim Siad Biarre yang diikuti dengan perang berkepanjangan. Namun proses transisi ini terhambat dan mengalami stagnasi di akibatkan perpecahan yang terjadi di pihak oposisi sendiri yang berbasis suku-suku yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

Menurut Gulermo O. Donnel, sebuah proses transisimenuju demokrasi ini dibutuhkan prasyarat yang harus dipenuhi yaitu⁷ :

1. Keberhasilan *recorvery economy*
2. Keberhasilan kelompok-kelompok pembaharu dalam menduduki posisi-posisi penting dalam kekuasaan yang baru lewat pemilu
3. Keberhasilan dalam mendapatkan dukungan dari kelas menengah dan masyarakat sipil
4. Dukungan dari pihak-pihak luar yang berpengaruh dalam kebijakan ekonomi, politik dan keamanan.

⁶ Samuel P. Huntigton, "Gelombang Demokratisasi Ketiga", Jakarta, Grafiti Press, 2000

⁷ O'Donnel, Guillermo dan Philipe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan ketidakpastian*, PT. Pustaka LP3S

3. Teori Legitimasi

Legitimasi menurut Lucian W. Pye adalah “suatu yang melibatkan kemampuan suatu sistem dan sentimen masyarakat terhadap otoritas pemerintahan⁸”.

Pengertian lain tentang legitimasi adalah pengakuan kekuasaan dari rakyat kepada penguasa atau dapat juga dikatakan :

1. Hak untuk berkuasa sehingga ditaati oleh rakyatnya
2. Pengakuan kekuasaan penguasa oleh rakyat yang ditunjukkan dengan ketaatan
3. Keabsahan kekuasaan penguasa untuk memimpin dan mengatur atau mengontrol rakyat dan rakyat mengakui keabsahan tersebut.

Di Somalia, otoritas pemerintahan tidak diakui karena pemerintahan itu sendiri dibentuk dan dipilih di Kenya tanpa melibatkan partisipasi rakyat Somalia seperti lewat Pemilu.

Berdasarkan Teori-teori diatas maka transisi demokrasi di Somalia termasuk dalam mode replacement karena diprakarsai oleh kelompok oposisi yang bergabung dalam sebuah dewan bernama Council for Reconstruction and Salvation. Sedangkan dari sisi legitimasi Pemerintah Transisi Nasional dianggap lemah karena tidak mewakili seluruh elemen masyarakat Somalia yang bertikai. Dsiamping dipilih di Kenya, basis konstruksi pemerintahan juga tidak bersumber dari sebuah konstitusi melainkan sebuah piagam.

⁸ Lucian W. Pye, “Legitimacy Crisis”, dalam Leonarrd Binder, et. Al., Crisis and Sequences in Political Development, Princeton University Press, Princeton, 1971, hal. 177.

D. Hipotesis

Dari Latar belakang masalah dan teori yang telah dijelaskan, maka didapat “ Paska kejatuhan rezim Siad Biarre tahun 1991, Transisi demokrasi tidak bisa berjalan maksimal di Somalia disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Pecahnya kelompok oposisi
2. Kuatnya budaya politik primordialisme
3. Keterpurukan ekonomi
4. Legitimasi politik yang lemah

E. Metodologi penulisan dan pengumpulan data

Dalam Ilmu Hubungan Internasional seringkali ditemukan kesulitan dalam teknik meneliti permasalahan internasional yang dikarenakan adanya jarak, kompleksitas masalah , dan lain-lain. Sehingga penulisan ini bersifat anobservasi research dan bersifat deskriptif.

Data-data yang akan digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori beserta data-data sekunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literature, jurna-

urnal di internet dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menjelaskan penyebab-penyebab tidak berjalannya demokrasi di Somalia paska rezim Siad Biarre, penulis memberikan batasan waktu penelitian yaitu dimulai pada saat jatuhnya rezim Siad Biarre di tahun 1991 sampai kemunculan Islamic Court Union yang menandingi otoritas Pemerintahan Transisi pada tahun 2006.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam karya tulis ini penulis membagi kedalam Lima Bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang memuat, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, mengemukakan gambaran umum tentang Somalia, mulai dari sejarah Somalia, kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan politik termasuk kondisi pemerintahan yang terjadi pada rejim Siad Biarre (1969 – 1991).

Bab ketiga, mengemukakan proses transisi demokrasi yang digagas oleh kelompok oposisi, termasuk pemberontakan dan pecahnya wilayah Somalia, Unifikasi Somalia dan pemberontakan oleh Islamic Court Union.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap transisi demokrasi yang terjadi di Somalia dan hambatan-hambatannya.

Bab kelima, merupakan Bab akhir yang menutup karya tulis ini, yang berisi